

PEMKAB WONOSOBO TERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SENILAI Rp160,7 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/bantuan-Gubernur-2024-wonosobo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serahkan bantuan keuangan tahun anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Senin (22/4/2024).

Bantuan keuangan tahun anggaran 2024 senilai Rp 160.765.824.500 diserahkan secara simbolis di Pendopo Bupati Wonosobo sore tadi.

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, penyerahan bantuan ini ditujukan untuk membantu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah.

"Dalam hal ini perlu ada campur tangan dari provinsi. Harapannya dengan bantuan ini dapat bermanfaat baik dan tepat sasaran," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari Pemerintah Provinsi.

Ia sampaikan, ini menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten untuk dapat terus semangat dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah yang sedang dihadapi.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan kita seperti kemiskinan dan bisa meningkatkan indeks kepuasan masyarakat," ucapnya.

Dalam acara tersebut, Bupati Wonosobo turut menyampaikan sekilas beberapa data-data menyangkut Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Disampaikannya, angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo berangsur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 kemiskinan di Wonosobo di angka 16,17 persen, sementara tahun 2023 di angka 15,58 persen.

Dengan ini Wonosobo berhasil naik dari sebelumnya yang sempat menjadi daerah paling

miskin di Jawa Tengah saat ini menjadi posisi ke 3 dari bawah.

Penurunan angka pengangguran terbuka juga terus terjadi di Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2020, dengan tahun ini berada di angka 5,32 persen. Pada tahun 2025 Pemkab Wonosobo menargetkan angka pengangguran terbuka di antara 3,0-4,0 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo dalam sejarah menembus nilai di atas 70, tahun ini di angka 70,18 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2022 berada di angka 5,02 persen, sementara di tahun 2023 di angka 4,3 persen.

Untuk angka prevalensi stunting Kabupaten Wonosobo berdasarkan data EPPGBM per Februari 2024 di angka 15,26 persen. Dengan ini menurun dari tahun 2022 di angka 22,7 persen.

Dengan bantuan yang diberikan ini, diharapkan akan berdampak positif terkait berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonosobo, Jaelani menyampaikan, Dinkes Kabupaten Wonosobo menerima bantuan Gubernur tahun ini senilai Rp 5.696.890.000 untuk penanggulangan masalah gizi.

Ia mengatakan, bantuan ini menjadi tambahan daya untuk mencapai target penurunan stunting di kabupaten Wonosobo.

"Dengan tambahan dana ini kita gunakan untuk tambahan makanan anak-anak bayi balita yang stunting dan ibu hamil dengan kurang energi kronis," tandasnya. (ima)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/22/pemkab-wonosobo-terima-bantuan-keuangan-provinsi-senilai-1607-miliar-rupiah>, "Pemkab Wonosobo Terima Bantuan Keuangan Provinsi Senilai 160,7 Miliar Rupiah", tanggal 22 April 2024.
2. <https://halosemarang.id/nana-sudjana-serahkan-bantuan-keuangan-lintas-sektor-di-wonosobo-senilai-rp-160-miliar>, "Nana Sudjana Serahkan Bantuan Keuangan Lintas Sektor di Wonosobo Senilai Rp 160 Miliar", tanggal 22 April 2024.
3. <https://inilahjateng.com/kabupaten-wonosobo-terima-bantuan-keuangan-senilai-rp-160-m/>, "Kabupaten Wonosobo Terima Bantuan Keuangan Senilai Rp 160 M", tanggal 22 April 2024.
4. https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/jateng-diy/pr-2467996262/pj-gubernur-jawa-tengah-serahkan-bantuan-keuangan-rp-15-miliar-untuk-15-desa-wisata-rintisan-di-wonosobo?taging=kabar-daerah&utm_medium=kabardaerah&utm_source=kabardaerah&page=all&utm_source=idle, "Pj Gubernur Jawa Tengah Serahkan Bantuan Keuangan Rp 1,5 Miliar untuk 15 Desa Wisata Rintisan di Wonosobo", tanggal 22 April 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)